



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, SH No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Situs: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el :surat@pn\_bantul.go.id

**TERKENDALI**

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) USULAN KEGIATAN TAHUN 2022

Kementerian/ Lembaga	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia (005)
Unit Eselon	:	Badan Peradilan Umum (03)
Satker	:	Pengadilan Negeri Bantul (400173)
Program	:	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF)
Sasaran Program	:	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel</li><li>2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum</li><li>3. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum</li><li>4. Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi</li></ol>
Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)
Sasaran kegiatan	:	Terselesaikannya perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu</li><li>2. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum</li></ol>
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Perkara Hukum Perseorangan (10.49.BCA)
Rincian Output (RO)	:	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat (BCA.U03)
Indikator Keluaran	:	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Volume Keluaran (output)	:	250
Satuan Ukur Keluaran	:	Perkara

#### A. Latar Belakang

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- g. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

## **2. Gambaran Umum**

Bahwa untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang hukum, maka pada tahun 2003, Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan penyusunan beberapa cetak biru (*Blue Print*) untuk mengawali Program Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya. Cetak biru tersebut merupakan pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Pada program Peningkatan Manajemen Peradilan umum, salah satu area pembaruan adalah percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu.

Langkah langkah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara :

1. Peningkatan tertib administrasi pengadilan yang transparan dan akuntabel
2. Penanganan perkara banding dan kasasi pada pengadilan tingkat pertama secara cepat, tepat dan akuntabel
3. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama secara tepat waktu

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2022.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima Manfaat pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut.

### **1. Internal**

Yaitu seluruh warga pengadilan dari para hakim, jajaran kepaniteraan dan jajaran sekretariat di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi agar berjalan dengan baik.

## 2. Eksternal

Stakeholder pengadilan yaitu para pihak pencari keadilan, jaksa, polisi dan seluruh warga yang menginginkan pelayanan prima dari pengadilan.

### C. Strategi Pencapaian Keluaran

#### 1. Kegiatan Yang Dilaksanakan

##### a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dilakukan melalui anggaran DIPA dalam bentuk UP / GUP.

##### b. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

##### 1. Tahapan penyusunan rencana dan program

- Dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya dengan menyusun rencana anggaran untuk diajukan.

##### 2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan

Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan/program melalui rapat awal tahun:

- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan.

##### 3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan (*controlling*) yang merupakan bagian dari kegiatan manajerial
- Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke tingkat banding dan eselon I berupa Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi Anggaran (SAI)

Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan selaku *decision maker* (pengambil keputusan) dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.

#### 2. Uraian Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum mempunyai Klasifikasi Rincian Output (KRO) kegiatan yaitu Perkara Hukum Perseorangan sebanyak 250 perkara,



	putusan kpd JPU dan terdakwa												
056	Minutasi/ Upaya hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
058	Penanganan perkara kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### G. Biaya Yang Diperlukan (*How Much*)

Kebutuhan biaya yang akan dibebankan pada DIPA 2022 untuk Jenis Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Barat ini diperlukan sebesar Rp. 98.245.000 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) untuk:

- Pendaftaran berkas perkara sebesar Rp. 23.370.000 (*dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- Penetapan hari sidang sebesar Rp. 4.150.000 (*empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*)
- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan sebesar Rp. 1.900.000 (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- Pemeriksaan disidang pengadilan sebesar Rp. 47.325.000 (*empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
- Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa sebesar Rp. 2.350.000 (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
- Minutasi/upaya hukum sebesar RP. 12.500.000 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 4.750.000 (*empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
- Penanganan perkara kasasi dan PK di pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.900.000 (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*)

sebagaimana RAB masing-masing Komponen Kegiatan terlampir.



Bali, 08 November 2021  
Sekretaris,

YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.  
NIP. 197908222005022001

**RAB UNTUK SBK TOTAL BIAYA KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPUT)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kementerian Negara/Lembaga : ( 005 ) Mahkamah Agung RI  
 Unit Eselon I : ( 03 ) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
 Program : ( 005.03.BF ) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
 Hasil : Tereleksikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan kauntabel di lingkungan peradilan umum  
 Unit Eselon II : 400173 - Pengadilan Negeri Bantul  
 Kegiatan : 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
 Indikator Kinerja Kegiatan : 01. Perakara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu  
 : 02. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum  
 Klasifikasi Rincian Output : Perakara Huklum Perseorangan (1049.BCA)  
 Rincian Output / satuan Ukur : Perakara Pidana yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama (BCA.U03) / Perakara  
 Volume : 250

No	Tahap Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Keterangan
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
051	Pendaftaran Berkas Perkara 521211 Belanja Bahan - Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 521811 Belanja Barang Untuk Perseidaan Barang Konsumsi - Alat Tulis Kantor	(N)		134 250	PKR PKR	20.000 82.760	23.370.000 2.680.000 20.690.000 20.690.000	
052	Penetapan Hart Sidang 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengiriman Penetapan Hart Sidang	(N)		83	OK	50.000	4.150.000 4.150.000 4.150.000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan 524114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan 524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	(N)		5 25	OK OK	30.000 70.000	1.900.000 150.000 1.50.000 1.750.000 1.750.000	
054	Pemeriksaan disidang Pengadilan 521211 Belanja Bahan - Konsumsi makan terdakwa - Konsumsi Pengaman dari Kepolisian	(N)		1500 393	OK OK	25.000 25.000	47.325.000 47.325.000 37.500.000 9.825.000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa 524114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan	(N)		5 30	OK OK	50.000 70.000	2.350.000 250.000 2.100.000 2.100.000	
056	Minutasi/Upaya hukum 521211 Belanja Bahan - Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	(N)		250	PKR	50.000	12.500.000 12.500.000 12.500.000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman berkas perkara banding di Pengadilan tingkat pertama 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa/terdakwa - Pemberitahuan Putusan Banding	(N)		25 25 25	PKR OK OK	50.000 70.000 70.000	4.750.000 1.250.000 1.250.000 3.500.000 1.750.000 1.750.000	

No	Tahap Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Keterangan	
		Biaya Utama	Biaya Pendukung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama 521114 Belanja pengiriman surat di ras pos pusat - Pengiriman berkas perkara Kasasi dan PK 521113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pembertahuan Proses Kasasi dan PK kepada Jakse/Kendakwa/PH - Pembertahuan Putusan Kasasi dan PK	(V)		10 10 10	PKR PKR PKR	50.000 70.000 70.000	1.900.000 500.000 1.400.000 700.000 700.000		
<b>TOTAL BIAYA KELUARAN</b>							98.245.000		

Ditelaah Oleh :

Penelaah K/L		Penelaah DJA	
Nama/NIP	Tanggal	Nama/NIP	Tanggal



Santul, 08 November 2021  
 Yuyun Kurniyah, S.E. AK  
 NIP. 197908221005022001